

**KESEPAKATAN DALAM KONTEKS PANCASILA
SEBAGAI SUMBER HUKUM NEGARA INDONESIA**

Skripsi

**Untuk memenuhi persyaratan memperoleh derajat strata satu
pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia**



Disusun oleh:

Nama : SHARON PAULI SANADA

NIM : 1540050048

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

JAKARTA

2019

VISI DAN MISI

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

Visi

Menjadi Universitas yang unggul dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian, dan pelayanan kepada masyarakat di Indonesia dan Asia sesuai dengan nilai-nilai Kristen dan Pancasila pada tahun 2034.

Misi

1. Meningkatkan kualitas proses pembelajaran dan sistem pelayanan administrasi akademik dan umum dengan memanfaatkan teknologi informasi dan telekomunikasi.
2. Meningkatkan mutu lulusan yang berintegritas dan kompeten di bidangnya serta mampu bersaing di era global.
3. Meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia yang berkelanjutan.
4. Meningkatkan kualitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
5. Mengembangkan hubungan kerjasama dengan instusional/internasional yang saling menguntungkan dan lembaga-lembaga gerejawi dalam semangat ekumenis.

**KESEPAKATAN DALAM KONTEKS PANCASILA
SEBAGAI SUMBER HUKUM NEGARA INDONESIA**

Skripsi

Untuk memenuhi persyaratan memperoleh derajat strata satu
pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

Disusun Oleh:

Nama : SHARON PAULI SANADA

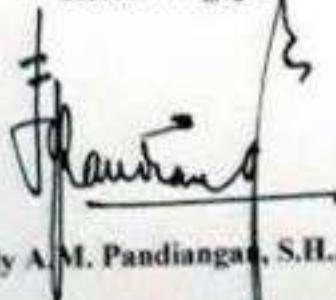
NIM : 1540050048

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal 26 Agustus 2019 dan dinyatakan telah lulus dan memenuhi syarat
untuk memperoleh gelar sarjana hukum (S1)

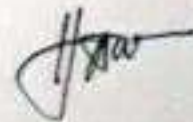
Susunan Tim Penguji

Ketua Penguji I



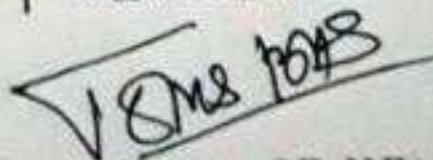
(E. Elly A. M. Pandiangan, S.H., M.H.)

Anggota Penguji II



(Inri Januar, S.H., M.H.)

Anggota Penguji III



(Tomson Situmeang, S.H., M.H.)

PESERTA UJIAN

Nama : SHARON PAULI SANADA

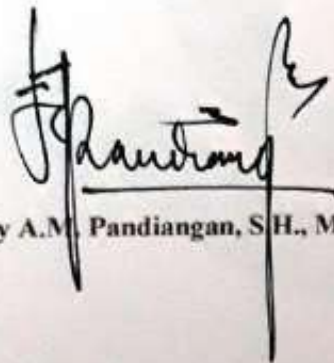
NIM : 1540050048

**KONTEKS KESEPAKATAN PANCASILA
SEBAGAI SUMBER HUKUM NEGARA INDONESIA**

Disetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II



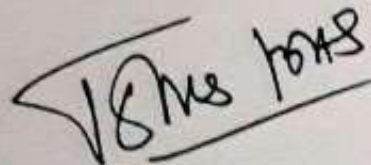
(L. Elly A.M. Pandiangan, S.H., M.H.)



(Inri Januar, S.H., M.H.)

Mengetahui,

Kepala Departemen Hukum Tata Negara



(Tomson Situmeang, S.H., M.H.)

PERSEMBAHAN

Secara khusus penelitian dan penyusunan skripsi ini penulis persembahkan untuk keempat orangtua dan saudara terkasih penulis :

Tulus Marpaung (Ayah) & Ir. Manaor Marpaung (Bapak)

Ida Sundariah (Ibu) & Adriati Marpaung (Bunda)

Nabil Saputra Marpaung (Kakak)

Terima kasih ku kepada kalian semua yang telah memberikan kepedulian, perhatian dalam cinta kasih kepada penulis, Tuhan Yesus Kristus Memberkati.

KATA PENGANTAR

Puji syukur dan terimakasih kepada Tuhan Yesus Kristus, sebab oleh karena kasih kemurahannya penulis dapat menyelesaikan penyusunan tugas akhir penelitian skripsi dengan judul **“Kesepakatan Dalam Konteks Pancasila Sebagai Sumber Hukum Negara Indonesia”**, adapun penelitian skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan memperoleh derajat strata satu pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.

Penulis sebagai mahasiswa program studi Ilmu Hukum mengambil fokus penelitian skripsi yaitu pada bidang Hukum Tata Negara, dimana penyusunannya berawal dari hasil diskusi penulis dengan salah satu dosen semasa kuliah pada saat penulis menempuh tahun ketiga di semester lima. Penelitian skripsi ini dilakukan untuk mengkaji maksud dan ruang lingkup sudut pandang hukum dari segi kesepakatan atau konsensus dalam praktik kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang didasarkan pada realitas kondisi dan dinamika yang ada di dalam suatu masyarakat atau negara hukum, yang dalam hal ini ialah Indonesia.

Kesepakatan adalah sebagai suatu elemen penting yang tidak termuat secara eksplisit namun diinsafkan dalam syarat sebuah negara hukum dalam produk hukumnya berupa dasar negara Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai hukum dasar, Ketetapan

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sebagai ketetapan yang merinci, menjabarkan dan menafsirkan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan dibawahnya.

Berdasarkan hal tersebut maka, Pancasila sebagai dasar negara dan juga ideologi bangsa atau *volksgeist* sebagaimana yang diistilahkan oleh Savigny adalah bentuk dari kesepakatan atau kontrak sosial masyarakat yang dijadikan objek atau variabel penelitian skripsi ini. Penulis kemudian menguraikannya secara cukup sesuai dengan syarat dan ketentuan penelitian skripsi melalui pendekatan sejarah, filsafat, politik dan hukum dalam rangka menemukan jawaban untuk menghasilkan pandangan dan kesimpulan atas rumusan masalah yang ada dengan metodologi penelitian kualitatif.

Kendati demikian penulis merasa bahwa hasil penelitian ini belum dapat begitu komprehensif sebagai sebuah referensi dalam penelitian lain yang serupa, mengingat penelitian ini mempunyai objek yang luas, sehingga oleh karenanya pada kesempatan yang lain penulis berniat untuk menyempurnakan penelitian ini dengan riset dan analisis yang lebih kritis dan mendalam pada jenjang akademik yang selanjutnya.

Dalam penyusunan tugas akhir penelitian dan penyusunan skripsi ini, penulis mendapat banyak sekali bantuan dan dukungan dari berbagai pihak yang inspiratif telah mengedukasi, memotivasi dan mengapresiasi,

oleh karenanya dengan segala ketulusan dan kerendahan hati, penulis mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., MBA selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia.
2. Bapak Hulman Panjaitan, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
3. Ibu L. Elly A.M. Pandiangan, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia yang juga dalam hal ini berperan sebagai dosen pembimbing I penulis, telah memberikan ilmunya dan mengarahkan penulis sehingga segala kegiatan penyusunan dan penelitian tugas akhir skripsi ini dapat berjalan dengan baik dan lancar.
4. Bapak Poltak Siringoringo, S.H., M.H., selaku Kepala Program Studi Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia yang telah dibuat sangat lelah oleh penulis dan rekan-rekan seperjuangan selama penulisan skripsi berlangsung hingga pada proses pengumpulan skripsi ini.
5. Bapak Inri Januar, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing II yang sejak awal sekali memahami maksud dan mengapresiasi ide penulis untuk melanjutkan penelitian skripsi ini, peran Bapak dalam segala aspek sejak awal kelas perkuliahan pada tahun pertama hingga pembimbingan tugas akhir penulis begitu penting dan sangat berarti.

6. Bapak Dr. Gindo E.L. Tobing, S.H., M.H., selaku dosen yang dalam kerendahan hatinya sebagai seorang yang berakal budi dan berilmu tetap setia untuk mendengarkan pikiran mahasiswa yang rumit sehingga hasil diskusi dengannya pada semester lima telah menginspirasi penulis untuk melakukan penelitian skripsi ini.
7. Bapak Tomson Situmeang, S.H., M.H. selaku Kepala Departemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia yang turut membantu memberikan saran dan masukan demi kelancaran dalam proses pengerjaan skripsi penulis.
8. Bapak dan Ibu dosen beserta staf Tata Usaha yang dengan semangat pelayanannya telah dengan penuh pengabdian memberikan perkuliahan dan perbantuan dengan ilmu-ilmu teoritis dan praktis maupun empiris dari pengalaman profesionalnya masing-masing telah membekali khazanah pengetahuan penulis sepanjang menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
9. Teman-teman yang begitu hebat dan luar biasa di angkatan 2015 Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, terkhusus terhadap kelompok yang diberi nama “**ALIANSI 4 TAHUN**” yang digagas dan diketuai oleh para sahabat penulis sendiri, Dicky Reynaldi Siahaan, dengan mana wakilnya Gopinda

Harianja, Roby Silangit, Valerian Barens sebagai Ketua Senat Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Masa Bakti 2018/2019, Oloan Siregar, Turiano Mangumban Habisuhton Simatupang.

10. Claudia Rosaulina Siringoringo, teman yang lebih dari sahabat selama hampir tiga setengah tahun bagi penulis, seseorang yang baik hati dan menyayangi penulis dalam segala bentuk perhatian dan kepeduliannya, semoga tahun-tahun yang telah kita jalani terus berlanjut hingga seterusnya.
11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah turut memberikan dukungan dan menaruh harapan kepada penulis selama perkuliahan terlebih pada saat penyusunan tugas akhir penelitian skripsi ini.

Kiranya semua yang terkasih dan tersebutkan baik secara tersurat maupun tersirat diatas selalu dilayakkan menerima berkat damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus dalam hidup yang dijalani.

Jakarta, Agustus 2019

Penulis,

Sharon Pauli Sanada

NIM. 1540050048

ABSTRAK

- A. Nama Mahasiswa : Sharon Pauli Sanada
- B. Nomor Induk Mahasiswa : 1540050048
- C. Judul Skripsi : Kesepakatan Dalam Konteks Pancasila
Sebagai Sumber Hukum Negara Indonesia
- D. Program Kekhususan : Hukum Tata Negara
- E. Jumlah Halaman : xvi + 99 halaman
- F. Daftar Bacaan : 28 Buku, 3 Undang-Undang, 2 Jurnal, 7
Website
- G. Kata Kunci : Kesepakatan, Hukum, Pancasila
- H. Ringkasan Isi :

Konsekuensi dari kehidupan manusia sebagai makhluk sosial mengartikan bahwa dalam dirinya melekat hak dan kewajiban serta memerlukan suatu perlindungan dari negara. Keberadaan negara dari sisi peradaban manusia dapat dilihat sebagai sebuah evolusi maupun revolusi karena adanya kecenderungan manusia untuk bekerjasama dalam masyarakat dan kemudian membentuk suatu negara atas kesepakatan dalam pengertian sebagai suatu kontrak sosial.

Kesepakatan lazimnya terbentuk atas persesuaian kehendak dari dua belah pihak karena adanya penawaran dan penerimaan (akseptasi), sehingga kesepakatan tersebut dijalankan oleh para pihak yang terlibat dalam hal ini ialah masyarakat yang membentuknya dengan mekanisme yang telah disesuaikan sebagai hukum. Kesepakatan disini membahas nilai-nilai kolektif dari masyarakat sebagai sebuah jiwa bangsa (*volksgeist*), yaitu dengan ideologi bangsa yang dalam hal ini adalah Pancasila sebagai ideologi dan sumber segala sumber hukum negara Indonesia. Kesepakatan yang sudah terbentuk kemudian melahirkan hukum karena diberikan otoritas yaitu daulat atau kuasa (*sovereign*) sebagai mekanisme penggerak atas unifikasi masyarakat dalam negara, sehingga dengan kata lain, kesepakatan sebagai kontrak sosial dalam konteks Pancasila.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dilakukan suatu penelitian dengan metode kualitatif yang substansinya menyelidiki paham filsafat hukum, peristiwa sejarah dan dinamika sosiologis masyarakat bangsa Indonesia. Pada akhirnya, penelitian ini berkesimpulan bahwa bentuk kesepakatan (kontrak sosial) telah diintervensi oleh relasi daulat atau kuasa.

ABSTRACT

The consequences of human life as social beings mean that rights and obligations are inherent in themselves and require protection from the state. The existence of the state in terms of human civilization can be seen as an evolution or revolution because of the tendency of humans to cooperate in society and then to form a state by agreement in the mean as social contract.

Agreements are usually formed based on the correspondence of the two parties due to the existence of an offer and acceptance, so that the agreement is carried out by the parties involved which in this term were the community that forms it with a mechanism that has been adjusted as law. The agreement here discusses about the collective values of society as a national soul (volksgeist), that is nation ideology which in this case is Pancasila as the ideology and the supreme source of state law of Indonesia. The agreement that was formed then gave birth to the law can be happened because it was given an authority by the sovereign or power as a movers mechanism on the unification of the people in the state, so it aim at the agreement as a social contract in the context of Pancasila.

Based on the description, this research was conducted using qualitative methods whose the substance were investigates the understanding of law philosophy, historical phenomenon and the sociological dynamics of the Indonesian people. As a conclusion, this research aim that the form of an agreement (social contract) had been intervened by the relation of power (sovereign).

Pembimbing I : L. Elly A.M. Pandiangan, S.H., M.H.

Pembimbing II: Inri Januar Simangunsong, S.H., M.H.

Jakarta, Agustus 2019

Penulis,

Sharon Pauli Sanada

NIM. 1540050048

DAFTAR ISI

VISI DAN MISI UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA	i
LEMBAR JUDUL	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Ruang Lingkup Penenelitian	9
D. Maksud dan Tujuan Penelitian	11
E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual	12
1. Kerangka Teoritis.....	12
2. Kerangka Konseptual	23
F. Metode Penelitian	29
G. Sistematika Penelitian.....	31

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- A. Manusia Sebagai Makhluk Sosial dan Subjek Hukum 34
- B. Hukum Sebagai Kesepakatan yang Berelasi dengan Perintah
Kekuasaan Agar Dapat Diterapkan
..... 35
- C. Perkembangan Budaya Sebagai Evolusi Atas Peradaban
Masyarakat Dalam Sebuah Negara
39
- D. Ideologi Pancasila Sebagai Konkritisasi dari Jiwa Bangsa
Indonesia yang Mendasari Unifikasi dan Kolektivitas Masyarakat
..... 43
- E. Pancasila Sebagai Daulat yang Mengintegrasikan Kesepakatan
Masyarakat Dalam Hukum 45

BAB III LATAR BELAKANG PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI BANGSA MENJADI SUPREMASI KESEPAKATAN HUKUM INDONESIA

- A. Asal-usul Nama Bangsa Indonesia 47
- B. Pancasila Dalam Konteks Sejarah Perjuangan Bangsa Indonesia
..... 48
1. Indonesia Zaman Prasejarah dan Zaman Sejarah
..... 48

2.	Indonesia Zaman Sejarah	
	49
3.	Reaksi Masyarakat Terhadap Perilaku Orang Belanda	
	51
4.	Sumpah Pemuda	52
5.	Masa Kemerdekaan Indonesia	53
	C. Pancasila Sebagai Kesepakatan Ideologi Bangsa	
	59

BAB IV LEGITIMASI PANCASILA SEBAGAI KESEPAKATAN HUKUM YANG MEMPENGARUHI DASAR DAN SISTEM HUKUM INDONESIA

A.	Pancasila Sebagai Dasar Negara	
	67 B.
	Pancasila Sebagai Paradigma Reformasi Hukum	
	69
1.	Pancasila Sebagai Sumber Nilai Perubahan Hukum	
	69
2.	Dasar Yuridis Reformasi Hukum	
	73
3.	Pancasila Sebagai Paradigma Reformasi Pelaksanaan Hukum	
	74
	C. Pancasila Sebagai Paradigma Reformasi Politik	
	75

D. Pancasila Sebagai Paradigma Terhadap Fenomena Reformasi Hukum (Konstitusi) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Sistem Ketatanegaraan	78
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	92
B. Saran	93
DAFTAR PUSTAKA	94
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	98